

Pengaruh Audit Operasional Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Inspektorat Kota Sukabumi

Dhea Adisty
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
dheadisty13@gmail.com

ABSTRACT

School operational funds as a component of the government is in need of financial expenditure management through the application of a good control and to measure the effectiveness of the Operational Assistance Fund, local governments through regional inspectorate needs to carry out operational audits that cover all aspects of the operational management of the School Operational Assistance Fund. Operational inspection activity should be beneficial for many public organizations have to support the smooth implementation of the Operational Assistance Fund in the future.

The purpose of this study was to determine the operational audit, the effectiveness of the implementation of Operational Support at SMP's in Sukabumi and the influence of operational inspectorate to audit the effectiveness of the School Operational Assistance. The method used in this study is a quantitative method. As for the relationship between variables is causal or associative causal shows the influence of independent variables on the dependent variable. Equipment statistical test used to determine how these effects by using simple regression analysis. The tests are certainly needed the data, in this case the data collection techniques used were interviews and questionnaires.

Based on the research that has been done shows that the operational audit on the Inspectorate Sukabumi been implemented properly / adequately. While the School Operational Assistance Fund in Sukabumi as a whole has performed quite effectively. Based on the hypothesis testing shows that there is a significant and positive effect of the operational audit of the effectiveness of school operational funds in Sukabumi Inspectorate, and the influence of the variable operational audit amounted to 51.4%.

Keywords: *operational audits and implementation of school operational funds*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Namun, masih banyak orang miskin yang memiliki akses terbatas dalam memperoleh pendidikan bermutu, antara lain karena mahal biaya pendidikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2005, untuk kelompok 20% rumah tangga termiskin, misalnya, presentase biaya pendidikan per anak terhadap total pengeluaran mencapai 10% untuk peserta didik SD, 18,5% untuk peserta didik SMP, dan 28,4% untuk peserta didik SMA.

Meningkatnya kebutuhan dalam bidang pendidikan telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan demi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) ini merupakan dana bantuan pemerintah di bidang pendidikan yang diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya program “Wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.”

Berkaitan dengan ini, secara khusus seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar negeri maupun sekolah swasta bebas dari beban biaya operasional sekolah. Yaitu seluruh siswa di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) negeri yang dibebaskan dari biaya operasional sekolah, kecuali Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Kehadiran Program BOS diharapkan akan mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua peserta didik, dan bahkan agar peserta didik miskin dapat memperoleh pendidikan secara gratis. Walaupun tujuan program sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan BOS tidak secara spesifik menekankan pendidikan gratis bagi peserta didik miskin, hal ini ditekankan dalam aturan pelaksanaan program.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran peserta didik, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal itu, program BOS dilakukan secara “*block grant*” yang ditransfer secara langsung ke sekolah-sekolah. Penggunaannya diserahkan kepada kepala sekolah bersinergi dengan komite sekolah yang secara rinci

dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, tentang penyimpangan atau penyelewengan baik dalam hal penerimaan maupun dalam hal penggunaan dana BOS, seperti misalnya dalam hal penerimaan yakni dana BOS yang diterima sekolah langsung ke rekening kepala sekolah, bukan pada rekening sekolah. Sedangkan dalam hal penggunaan, kurang sesuai dengan anjuran dari Departemen Pendidikan Nasional, sehingga dana yang dikeluarkan kurang efektif. Kemudian kasus yang terjadi lainnya ialah adanya sekolah yang masih meminta pungutan terhadap orang tua peserta didik. Padahal, dengan BOS yang diberikan pemerintah seharusnya sekolah bisa di gratiskan dan tidak ada pungutan biaya seperti pungutan untuk SPP atau pungutan untuk kegiatan belajar mengajar lainnya.

Permasalahan lainnya adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid / wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekurangan anggaran sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dalam praktek pihak kepala sekolah yang dominan untuk melakukan pengelolaan BOS, belum lagi masih rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh

sekolah tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan publik, sehingga akuntabilitas dan kredibilitas masih diragukan.

Selain itu pula masih adanya pelaksanaan audit operasional dana BOS yang hanya dilakukan pada sekolah saja. Padahal audit sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dari aliran dana BOS tersebut, dari hulu hingga kehilir termasuk pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pengeluaran dana yang dilakukan para pengelola dana itu. Audit operasional yang dilakukan inspektorat ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan karena semua dana yang digunakan adalah uang rakyat.

Pemeriksaan operasional inspektorat pada dasarnya merupakan aktivitas operasi dari suatu organisasi publik yang bertujuan untuk memeriksa efisiensi dan efektivitas operasi dari anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Baiknya aktivitas pemeriksaan operasional akan bermanfaat banyak bagi organisasi publik karena dapat menunjang kelancaran dari pelaksanaan Dana Bantuan Operasional dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas penulis dalam penelitian ini mengangkat objek penelitian yang akan diteliti dengan judul Pengaruh Audit Operasional Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Inspektorat Kota Sukabumi

II. KERANGKA TEORITIS

Auditing adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan klien. Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan, walaupun dalam pelaksanaannya sangat memungkinkan ditemukannya kesalahan atau kecurangan.

Sebagai ilmu pengetahuan, pengertian auditing sendiri telah dirumuskan oleh beberapa akademisi.

Menurut Mulyadi (2002:9) pengertian auditing adalah sebagai berikut :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Berdasarkan berbagai definisi diatas, terdapat beberapa karakteristik dalam pengertian *auditing* yaitu :

1. Informasi yang dapat diukur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam proses pemeriksaan, harus ditetapkan kriteria-kriteria informasi yang diperlukan dan informasi tersebut dapat diverifikasi kebenarannya untuk dijadikan bukti audit yang kompeten.
2. Entitas Ekonomi (*Economy Entity*) Proses pemeriksaan harus

jasas dalam hal penetapan kesatuan ekonomi dan periode waktu yang diaudit. Kesatuan ekonomi ini sesuai dengan Entity Theory dalam Ilmu Akuntansi yang menguraikan posisi keuangan suatu perusahaan terpisah secara tegas dengan posisi keuangan pemilik perusahaan tersebut.

3. Aktivitas mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti Proses pemeriksaan selalu mencakup aktivitas mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang dianggap kompeten dan relevan dengan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan. Diawali dari penentuan jumlah bukti yang diperlukan sampai pada proses evaluasi atau penilaian kelayakan informasi dalam pencapaian sasaran kegiatan audit.
4. Independensi dan Kompetensi Auditor Pelaksana Auditor pelaksana harus mempunyai pengetahuan audit yang cukup. Pengetahuan (*knowledge*) itu penting untuk dapat memahami relevansi dan keandalan informasi yang diperoleh. Selanjutnya informasi tersebut menjadi bukti yang kompeten dalam penentuan opini audit. Agar opini publik tidak salah maka pihak auditor dituntut untuk bersikap bebas (*independen*) dari kepentingan manapun. Independensi adalah syarat utama agar laporan audit objektif.
5. Pelaporan Audit Hasil aktivitas pemeriksaan adalah pelaporan pemeriksaan itu. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi

auditor tadi dapat dimengerti maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Artinya laporan ini mampu menyampaikan tingkat kesesuaian antara informasi yang diperoleh dan diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Audit operasional seringkali diartikan sama dengan audit manajemen. Pengertian sederhana dari audit manajemen adalah investigasi dari suatu organisasi dalam semua aspek kegiatan manajemen dari yang paling tinggi sampai dengan ke bawah dan pembuatan laporan audit mengenai efektivitasnya atau dari segi profitabilitas dan efisiensi kegiatan bisnisnya. Sedangkan pengertian sederhana audit operasional adalah uraian aktifitas perusahaan yang sistematis dalam hubungannya dengan tujuan untuk melihat, mengidentifikasi peluang perbaikan, atau mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan. Jelas kedua pengertian serupa karena pemeriksaan manajemen dilakukan saat manajemen beroperasi.

Berikut ini adalah definisi yang diungkapkan oleh Sukrisno Agoes (2012:11) mendefinisikan audit operasional sebagai berikut :
“*Operasional audit*, adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasional tersebut sudah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis.”

Adapula definisi yang diungkapkan oleh Islahuzzaman (2012:44) mendefinisikan audit operasional sebagai berikut :
“*Riview* atas setiap bagian prosedur dan metode operasi organisasi dengan tujuan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas, juga disebut sebagai audit manajemen (*management auditing*) dan audit kinerja (*performance auditing*)”.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa audit operasional adalah suatu upaya pemeriksaan secara sistematis, selektif dan analitis terhadap pengelolaan manajemen, guna mengidentifikasi berbagai kekeliruan atau penyimpangan, kemudian memberikan rekomendasi berbagai alternatif perbaikan untuk manajemen bahwa dalam pencapaian tujuan perusahaan sumber-sumber daya yang dimiliki agar digunakan secara hemat, efektif dan efisien.

Sedangkan Menurut Mulyadi (2002:32) mendefinisikan audit operasional sebagai berikut :
“Audit Operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.”

Menurut Sukrisno Agoes (2012:10) jika ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

1. Pemeriksaan Umum (General Audit)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran

laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Sedangkan jika ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

1. Management Audit (Operational Audit)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan

(manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dll)

3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian *internal audit* perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4. Computer Audit

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.

Audit operasional dimaksudkan terutama untuk mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan kegiatan, program, aktivitas dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Manfaat audit operasional menurut Amin Widjaja Tunggal (2000:14-15) adalah sebagai berikut :

1. Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan.
2. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-laporan dan pengendalian.
3. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial ditetapkan, rencana-rencana, prosedur serta

- persyaratan peraturan pemerintah.
4. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil.
 5. Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumberdaya termasuk memperkecil pemborosan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat terlihat bahwa manfaat audit operasional adalah untuk memberikan saran-saran tentang cara pelaksanaan yang lebih cermat serta untuk menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas yang diperiksa. Jika tujuan dari pemeriksaan keuangan adalah untuk menilai ketelitian laporan keuangan suatu periode yang berorientasi ke masa yang akan datang, dimana tujuannya untuk menghindari terjadinya kecurangan atau kelemahan perusahaan dalam beroperasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan audit operasional tidak hanya mendorong dilakukannya tindakan korektif tetapi juga menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan atau kelemahan dimasa yang akan datang menghasilkan perbaikan bagi pengelolaan operasi organisasi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan cara memberikan rekomendasi sebagai hasil pemeriksaan.

Menurut Mulyadi (2002:32) tujuan audit operasional adalah sebagai berikut : “1. Mengevaluasi kinerja, 2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, 3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.”

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 - 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Menurut Dirjen Mandikdasmen, (2013:2), pengertian Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut : “Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”.

Berdasarkan definisi tersebut maka bantuan operasional sekolah (BOS) pada dasarnya merupakan komponen pembiayaan operasional non personil, bukan ditujukan untuk pembiayaan kesejahteraan guru.

Secara umum, komponen utama pembiayaan BOS adalah biaya satuan pendidikan (BSP). BSP merupakan biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa setiap tahun

sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Dalam penggunaannya, BSP dibedakan menjadi BSP Investasi dan BSP Operasional.

BSP Investasi merupakan biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumberdaya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih satu tahun. Contohnya adalah pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP Operasional merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun yang habis pakai digunakan satu tahun atau kurang. Biaya BSP Operasional mencakup biaya personil dan non personil.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/ADLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah.
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Menurut Islahuzzaman (2012:132) pengertian Efektivitas (Effectiveness) adalah :

“Berdayaguna. Kemampuan suatu unit untuk mencapai atau melampaui

sasaran, terget, atau tujuan yang diinginkan (yang telah ditetapkan lebih dahulu), Efektivitas menggambarkan hubungan suatu pusat pertanggung jawaban dengan tujuan yang dicapai. Berapa masukan (input) yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran (output)”.

Efektivitas diselenggarakannya penyaluran dana BOS di dalam masyarakat akan dikembalikan lagi kepada subjek-subjek yang terlibat dalam pencapaian tujuan disalurkan dana BOS ini kepada masyarakat. Karena keefektifan penyelenggaraan dana BOS ini akan tercapai dengan maksimal jika subjek tersebut baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, yang dalam hal ini juga terkhusus kepada penyelenggara pendidikan di Indonesia telah kembali pada titik memaknai tujuan dari diselenggarakannya ketetapan tersebut yakni demi kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya, saat ini keefektifan penyelenggaraan dana BOS belumlah mencapai titik dimaksimalkannya fungsi penyaluran dana BOS tersebut sehingga masyarakat sendiri masih belum merasakan kesejahteraan yang sejatinya dijanjikan dalam penetapan diadakannya dana Bos tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan dana BOS telah berjalan dengan efektif, jika dana BOS tersebut digunakan dan disalurkan sesuai dengan pedoman dana BOS yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Mekanisme Alokasi

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan oleh tim manajemen BOS pusat untuk mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, tim manajemen BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Provinsi.

Tim manajemen BOS kabupaten/kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui surat keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota dan dewan pendidikan. SK yang telah ditanda tangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menanda tangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

Tim manajemen BOS Kab/Kota mengirimkan SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke tim manajemen BOS provinsi, tembusan ke bank/pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.

Penyaluran dan Pengambilan dana BOS

a. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana BOS yang dilakukan oleh tim manajemen dana BOS memiliki syarat dan ketentuan, dimana tim manajemen mengumpulkan data jumlah tiap sekolah dan syarat yang berlaku

untuk menentukan penyaluran dana BOS adalah sebagai berikut :

- a. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (Tidak Boleh atas Nama Pribadi).
- b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada tim manajemen BOS kabupaten/kota (Format BOS-03).
- c. Tim manajemen BOS kabupaten/kota melakukan verifikasi dan kompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada tim manajemen BOS provinsi. Disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS.

Penyaluran dana BOS untuk periode januari-desember 2010 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan dana BOS disalurkan setiap periode 3 bulan, dana BOS diharapkan disalurkan dibulan pertama dari setiap periode 3 bulan, kecuali periode januari-maret paling lambat bulan february, khusus penyaluran dana periode juli-september, apabila data jumlah siswa tiap sekolah pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan data periode april-juni. Selanjutnya, jumlah dana BOS periode oktober-desember disesuaikan dengan jumlah yang telah disalurkan periode juli-september, sehingga total dana periode juli-desember sesuai dengan yang semestinya diterima oleh sekolah.

2. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS disekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama

antara tim manajemen BOS sekolah dewan guru dan komite sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Adapun dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (Misalnya untuk photocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).
2. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (Hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK).
3. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (Selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi diperpustakaan.

4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (Misalnya untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, photocopy, pembeli alat olahraga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran mengikuti lomba).
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (Misalnya untuk photocopy/pengadaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan lapor siswa).
6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku induk inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari disekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. Khusus disekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut

- memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
 9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas diluar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.

Larangan Penggunaan dana BOS

Dana BOS tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Disimpan dalam jangka waktu

lama dengan maksud dibungkakan.

2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya lama, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kab/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, bilamana pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (Bukan Inventaris sekolah).
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedung/ruangan baru.
9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.
11. Khusus untuk sekolah yang menerima DAK, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membeli buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi perpustakaan.
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.

13. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/ acara keagamaan.
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga diluar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan kementerian pendidikan nasional.

Berdasarkan pengertian yang telah di uraikan diatas, maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini adalah :

H : Terdapat pengaruh yang signifikan audit operasional terhadap efektivitas pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah di Inspektorat Kota Sukabumi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel *probability sampling method* dimana anggota sample yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Berdasarkan pengertian tersebut maka, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik sampling dan sensus. Sensus pada dasarnya sebuah riset survey dimana

peneliti mengambil seluruh anggota populasi sebagai respondennya. Dengan demikian sensus menggunakan total sampling, artinya jumlah total populasi yang diteliti sehingga hasil penelitian yang diharapkan akurat dan valid.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu *microsoft excel* dan menggunakan program aplikasi SPSS (*Statistical and Service Solution*) Type 21.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis Regresi Linier Sederhana. Dalam melakukan analisis regresi linier sederhana, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik.

Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas. Selain itu adapun uji yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengujian hipotesis yang terdiri dari uji t, dan uji R².

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X	30	34	55	44,27	5,017
Y	30	68	92	78,23	5,131
Valid N (listwise)	30				

Berdasarkan tabel 1 variabel Audit Operasional memiliki nilai minimum 34 dan nilai maksimum 55. Nilai rata-rata sebesar 44,27, standar deviasi sebesar 2,071. Angka 44,27 tersebut menunjukkan angka yang relatif tinggi karena simpangan baku pada Audit Operasional lebih rendah dari 44,27 yaitu 5,071. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya variasi pada Audit Operasional di Inspektorat Kota Sukabumi.

Efektivitas Pelaksanaan Dana BOS memiliki nilai minimum 68 dan nilai maksimum 92. Nilai rata-rata sebesar 78,23, standar deviasi sebesar 5,131. Angka 78,23 tersebut menunjukkan angka yang relatif tinggi karena simpangan baku pada Efektivitas Pelaksanaan Dana BOS lebih rendah dari 78,23 yaitu 5,131. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya variasi pada Efektivitas Pelaksanaan Dana BOS .

UJI ASUMSI KLASIK

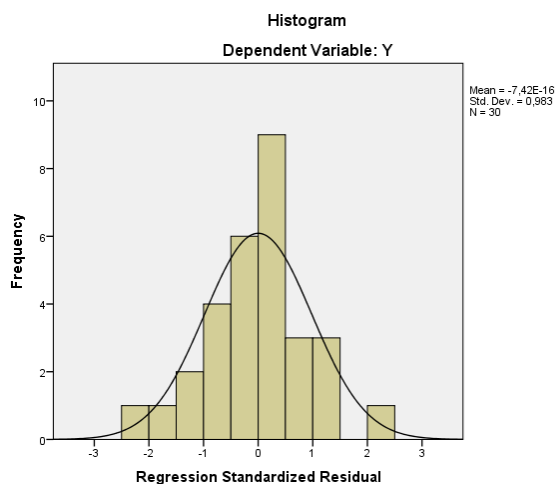
Uji Normalitas

Tabel 4.2
Uji Kolmogorov-Smirnov Test
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
X	,145	30	,105	,968	30	,490
Y	,149	30	,090	,960	30	,308

a. Lilliefors Significance Correction

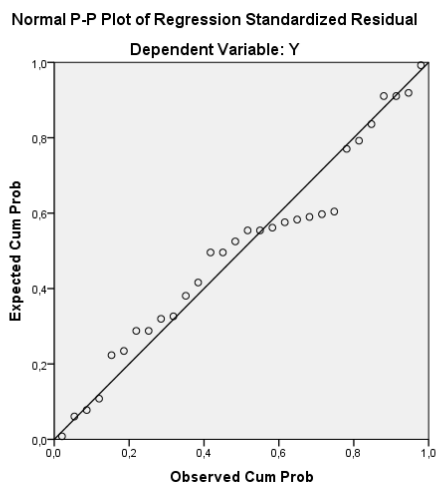
Berdasarkan tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki data yang berdistribusi normal. untuk Audit Operasional dan Efektivitas Pelaksanaan dana BOS memiliki kenormalan data $> 0,05$, dimana Audit Operasional $0,105 > 0,05$, dan Efektivitas Pelaksanaan dana BOS $0,090 > 0,05$. Karena data sudah memenuhi syarat kenormalan maka dapat dilaksanakan uji asumsi klasik,



uji regresi, dan uji hipotesis.

Gambar 4.1
Histogram Pada Inspektorat Kota Sukabumi

Dari hasil uji normalitas di atas dapat memperlihatkan bahwa grafik pada histogram di atas terdistribusi mengikuti kurvs berbentuk lonceng yang tidak condong (*skewnees*) ke kiri maupun ke kanan sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.



Gambar 4.2
Normal P-P Plot of Regression Standardized residual
Grafik pada Inspektorat Kota Sukabumi

Tampak bahwa Pada Grafik 4.5 Normal P-P Plot of *Regression Standardized residual* pada Inspektorat Kota Sukabumi, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Maka, model regresi layak digunakan untuk pengujian karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Regresi Sederhana

Tabel 4.3
Output Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	45,777	6,001		7,628	,000
X	,733	,135	,717	5,442	,000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa persamaan regresi linier sederhana pada Inspektorat Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

$$Y = 45,777 + 0,733 X$$

Keterangan :

Y: Efektivitas Pelaksanaan Dana BOS

X: Audit Operasional

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien intercept dari persamaan di atas adalah sebesar 45,77 yang mengandung pengertian bahwa pada saat Audit Operasional (X) tetap, maka Efektivitas Pelaksanaan Dana BOS (Y) adalah sebesar 45,77. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui bahwa jika

Audit Operasional (X) naik maka Efektivitas Pelaksanaan Dana BOS akan turun sebesar 0,733.

PENGUJIAN HIPOTESIS

UJI T (Secara Parsial)

Tabel 4.4
Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	45,777	6,001		7,628	,000
X	,733	,135	,717	5,442	,000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel 4 Output regresi sederhana untuk Inspektorat Kota Sukabumi, dapat dilihat t_{hitung} untuk Audit Operasional adalah sebesar 5,442, sedangkan t_{tabel} adalah sebesar 2,024 (dengan menggunakan fungsi TINV pada *Microsoft excel*) yaitu $t_{tabel} = TINV(0.05;34)$. Sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,442 > 2,024$) maka hipotesis H_0 ditolak H_a diterima. Untuk melihat signifikasinya, terlihat hasil statistik t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dari nilai sig. = 0,000 > taraf signifikansi 0,05 (5%). Yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara Audit Operasional

terhadap Efektivitas Pelaksanaan Dana BOS secara parsial.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 4.5
Koefisien Determinasi
Inspektorat Kota Sukabumi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,717 ^a	,514	,497	3,640	1,054

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel 5 Diketahui nilai R² (Adjusted R Square) untuk Inspektorat Kota Sukabumi adalah 0,514, artinya Sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu sekitar 51,4 % sedangkan sisanya sebesar 48,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Untuk mengetahui pengaruh variabel X (Audit Operasional) terhadap Y (Efektivitas Pelaksanaan Dana BOS), dilakukan perhitungan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = Koefisien determinasi
r = Koefisien korelasi

Sehingga diketahui koefisien determinasinya sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,717)^2$$

$$Kd = 0,5140 \times 100\%$$

$$Kd = 51,4\%$$

Adapun kriteria untuk koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

1. Jika “Kd” mendekati 0, maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y lemah.
2. Jika “Kd” mendekati 1, maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y kuat.

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai $Kd = 51,4\%$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Audit Operasional terhadap Efektivitas Pelaksanaan Dana BOS termasuk kedalam kriteria kuat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Audit Operasional pada Inspektorat Kota Sukabumi telah dilaksanakan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit operasional inspektorat telah memenuhi tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, seperti kualifikasi dari auditor, tahapan audit awal, tahap pelaksanaan dan tahap akhir dari hasil pemeriksaan berupa laporan dan tindak lanjut, namun masih perlu ditingkatkan terutama menyangkut analisis yang cermat atas hasil temuan.
2. Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Sukabumi secara keseluruhan telah dilaksanakan cukup efektif, hal ini ditunjukkan oleh efektifnya pengawasan, pemeriksaan dan

sanksi yang dapat berperan penting dalam mencegah, memberantas kecurangan dan korupsi dari dana bantuan operasional sekolah, namun dalam hal penggunaan dana bantuan operasional sekolah buku dan dana bantuan operasional sekolah reguler masih terjadi penyimpangan dimana buku untuk ajaran buku yang harus dibeli kadang kala tidak tersedia untuk seluruh siswa.

3. Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari audit operasional terhadap efektivitas pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah di inspektorat kota sukabumi, dan besarnya pengaruh dari variabel audit operasional adalah sebesar 51,4 %

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis masih menemukan kelemahan yang cukup signifikan. Adapun saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Inspektorat kota sukabumi sebaiknya memberikan kesempatan yang merata bagi para auditor untuk memperoleh pendidikan profesi akuntan pada jenjang yang lebih tinggi, sehingga diharapkan kemampuan mereka dalam menganalisis hasil temuan lebih cermat dan berkualitas.
2. Searah dengan tujuan program BOS yaitu dalam rangka pembebasan siswa miskin/tidak mampu untuk memperoleh

layanan pendidikan dasar yang berkualitas, hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar seperti penyediaan buku yang lebih memadai sesuai dengan jumlah siswa.

3. Bagi peneliti selanjutnya perlu memasukan variabel-variabel lain yang diperkirakan berinteraksi dengan efektivitas pelaksanaan bantuan operasional sekolah seperti kebijakan pemerintah daerah, kualitas dan pengalaman auditor dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno. 2012. *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik) Buku 1 Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat
- Dirjen. 2013. *Petunjuk Teknis (Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS)*. Jakarta: Depdikdas
- Islahuzzaman. 2012. *Istilah-istilah Akuntansi dan Auditing*. Edisi 1. Jakarta : BumiAksara
- Karding, Abdul. 2008, “ *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang*”. Thesis.2008
- Kusmayadi, Dedi. 2009. “*Pengaruh Audit Operasional Terhadap Implementasi Strategi dan Dampaknya Pada Laba Operasi*”.*Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.XV No. 1*. 2010
- Maulana, Agus. 2001. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jilid 1. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Mulyadi. 2002. *Auditing. Cetakan kesatu*. Jakarta: Salemba Empat
- Pembimbing Skripsi Akuntansi. 2013. *Penyusunan Skripsi*, Sukabumi.
- Rochaety, Tresnaty, Majdid, E. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi ke-1. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi Ke-4*, Buku Ke-1. Jakarta: Salemba Empat
- SMERU. 2006. *Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Lembaga Penelitian SMERU, No.19 Jul-Sep/2006.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke-14. Bandung: Alfabeta
- Sugiono, 2012.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta
- Tunggal, Amin Widjaja. 2004. *Audit Manajemen Kontemporer, edisi revisi* Jakarta : Harvarindo.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2008. *Risk Based Auditing*. Jakarta : Harvarindo